



Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kumuh dan
Lingkungan Hidup**

TAHUN 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIM
KABUPATEN TASIKMALAYA**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46462

Telepon (0265) 548786, Faksimile (0265) 548777

Laman : dputrprkplh.tasikmalayakab.go.id Pos-el dputrprkplh@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 000.7.2.8/KEP.140/SEKRE/2026

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pengendalian capaian kinerja di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, perlu adanya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Bahwa rancangan akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan. Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen LKIP;
12. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Nomor OT.05/Kep.11/DPUTRLH/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

: Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025;

KEDUA

: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana DIKTUM KESATU adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi;

KETIGA

: Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan KEDUA bertujuan sebagai:

- 1) Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Januari 2026

a.n Bupati Tasikmalaya

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Drs. KUNDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Mangunreja - Sukaraja Km. 1,200, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46462
Telepon (0265) 548786, Faksimile (0265) 548777
Laman : dputrprkplh.tasikmalayakab.go.id Pos-el dputrprkplh@tasikmalayakab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR: 000.7.2.8/321/SEKRE/2026

Pada hari ini, Kamis Tanggal 29 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya telah dilaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Acara dipimpin oleh Kepala Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya selaku Penanggungjawab Penyusunan LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan dihadiri oleh Sekretaris Dinas selaku Ketua Tim dan seluruh Kepala Bidang dan Anggota Tim Penyusun LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Hasil Reviu LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, telah disepakati kesesuaian bab per bab dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah termasuk kesesuaian data kinerja yang disajikan telah disepakati oleh masing-masing unit kerja yang disandingkan Perjanjian Kinerja dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 beserta perbandingan-perbandingannya.

Demikian Berita Acara Reviu LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dan disepakati pada tanggal tersebut di atas, dengan dilampirkan Lembar Pengesahan LKIP Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Dibuat di Singaparna

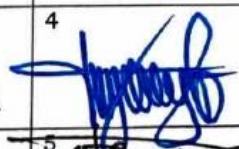
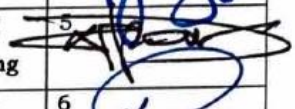
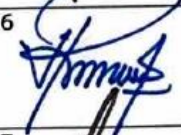
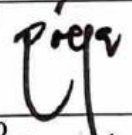
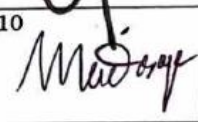
pada tanggal 29 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Drs. RUTTI SONJAYA SAEHURI, M.Pd

**LEMBAR PENGESAHAN LKIP DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.	Plt. Kepala Dinas	1 
2	H. RD RUSLAN MUNAWAR, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas	2 
3	DEDI BUDIMAN, ST, M.Si, MT	Kepala Bidang SDA	3 
4	AGUS HERMAWANTO, S.T, MT	Kepala Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi	4 
5	ALDRI PRANOWO, ST	Kepala Bidang Penataan Ruang	5 
6	Ir. RISNANDAR NURDIANTO, ST. MT	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan	6 
7	DADAN RUDIANA, ST, MM	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7 
8	FARHAN FUADI MUSLIM S.Si, MM	Kepala Bidang Lingkungan Hidup	8 
9	ARIEF KURNIAWAN, S.Kom	Perencana Ahli Muda	9 
10	WINDA DWI MEIDASARI, SE, M.Si	Analisis PEP	10 

Kata Pengantar

اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ijin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan 3(tiga) urusan pemerintahan dan juga termasuk dalam perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang pekerjaan umum dan urusan bidang perumahan rakyat yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh 6 (enam) bidang dan 12 (dua belas) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dokumen LKIP ini merupakan bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi organisasi secara terukur dengan memperhatikan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan.

Selanjutnya, ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, semoga dokumen LKIP ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan serta menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

وَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Tasikmalaya, Januari 2026
**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Drs. RUDI SONJAYA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670918 198903 1 007

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	
a. Kedudukan dan Tugas Pokok dan Fungsi	I-2
b. Struktur Organisasi	I-3
c. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	I-4
d. Isu Aktual	I-9
e. Sistematika Penulisan	I-10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
a. Rencana Strategis Perangkat Daerah	II-1
b. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	II-2
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
a. Capaian Kinerja Organisasi	III-1
b. Realisasi Anggaran	III-50
c. Analisis Efisiensi	III-52
Bab IV Penutup	IV-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025	I-5
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Jabatan Tahun 2025	I-5
Tabel 1.3.	Sarana dan Prasarana DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	I-6
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	II-1
Tabel 3.1.	Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2024	III-2
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025	III-43
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Dan Realisasi Pada Tahun Sebelumnya	III-43
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmlaya Pada Tahun Pelaporan Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra SKPD	III-44
Tabel 3.6.	Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	III-45
Tabel 3.7.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Dan Peningkatan/ Penurunan Pencapaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2025	III-46
Tabel 3.8.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-47
Tabel 3.9.	Capaian Program/Kegiatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-47
Tabel 3.10.	Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Akuntabilitas Keuangan	III-51

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	I-3
Gambar 1.2.	ASN Dan PPPK DPUTRLH berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2025	I-4
Gambar 3.1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-6
Gambar 3.2.	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-10
Gambar 3.3.	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-15
Gambar 3.4.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-19
Gambar 3.5.	Kegiatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-22
Gambar 3.6.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-26
Gambar 3.7.	Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-29
Gambar 3.8.	Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-32
Gambar 3.9.	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut Tahun 2025	III-36
Gambar 3.10.	Kegiatan Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025	III-39

01

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat: DPUTRLH) Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu Pemerintah Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja demi terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang **dimaksudkan** sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Adapun **tujuan** dari penyusunan LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya ini adalah sebagai media penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi

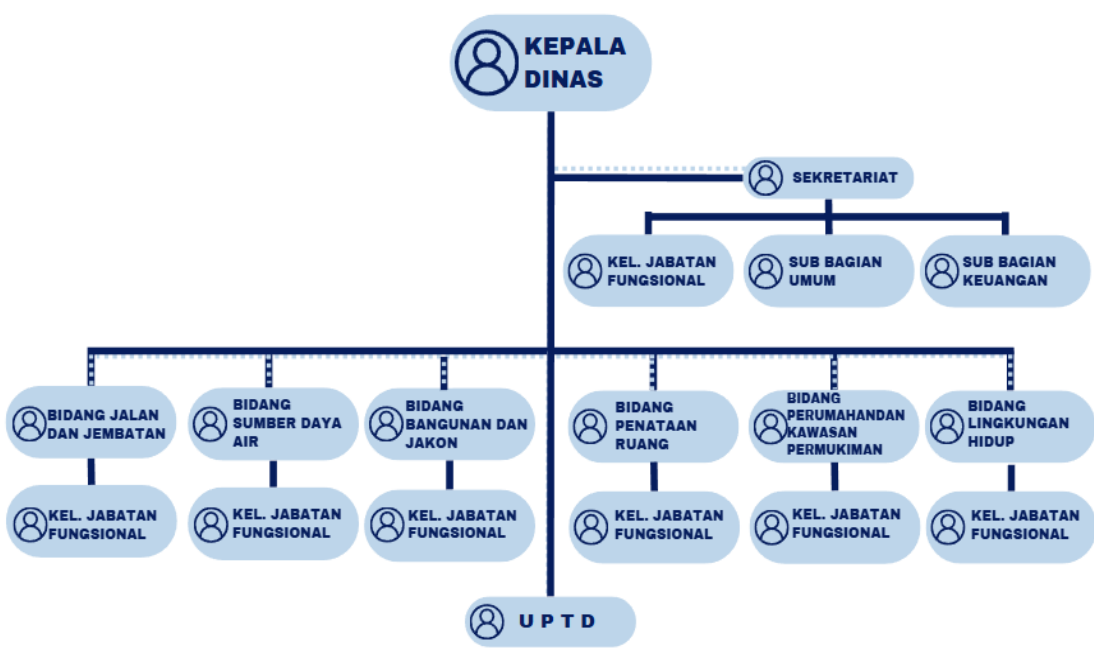
DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu : 1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, 2) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan 3) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Tasikmalaya.

Kedudukan, susunan organisasi beserta tugas dan fungsi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, khususnya pada Bagian Ketujuh Pasal 25 sampai dengan Pasal 28. DPUTRLH dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Penjelasan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, DPUTRLH mempunyai **tugas pokok** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, mempunyai **fungsi**:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya

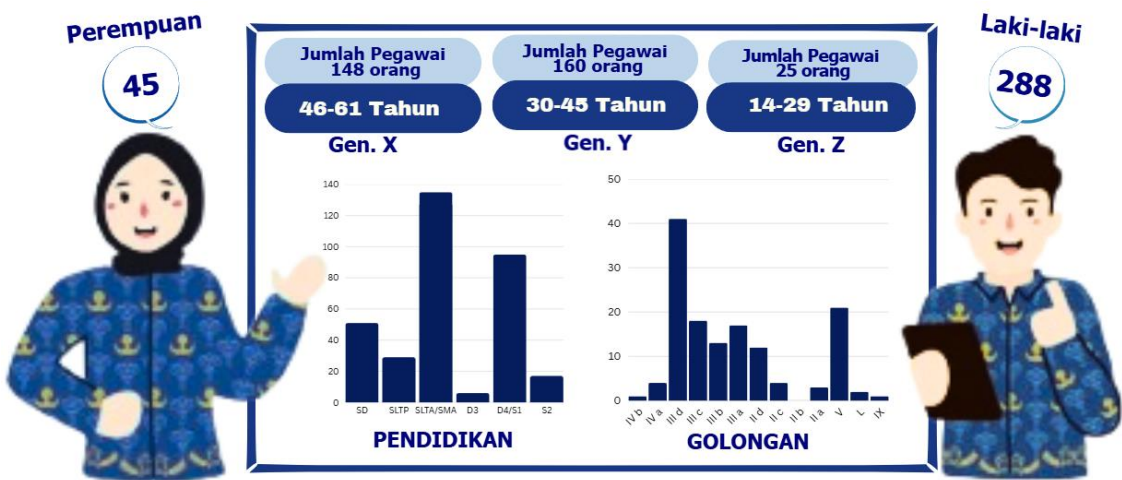
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Sumber Daya Air;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Penataan Ruang;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Aspek Kepegawaian, Sarana dan Prasarana

Dalam aspek kepegawaian, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2025, jumlah aparatur DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sebanyak **333 orang**, terdiri dari 113 ASN dan 24 PPPK dan 196 PPPK PW, yang secara jumlah dan komposisinya dapat dilihat dengan profil sebagai berikut:



Gambar 1.2.
Pegawai DPUTRLH Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran DPUTRLH dalam menghadapi

dinamika perubahan lingkungan strategis, diantaranya keberadaan sumber daya manusia (SDM). Dengan SDM yang yang kompeten, professional, berpendidikan tinggi, DPUTRLH diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerja dengan lebih baik.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Status Kepegawaian
Tahun 2025

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	90	23	113
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	18	6	24
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	180	16	196
Jumlah Total		288	45	333

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
berdasarkan Jabatan
Tahun 2025

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	-	-	-
2	Jabatan Administrator	5	2	7
3	Jabatan Pengawas	19	4	23
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	1	-	1
5	Fungsional Arsiparis	-	1	1
6	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda	3	-	3
7	Fungsional Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	-	1
8	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	1	-	1
9	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	-	1
10	Fungsional Penata Ruang Ahli Muda	3	-	3
11	Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama	-	1	1
12	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2	-	2
13	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	2	-	2
14	Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	3	1	4
15	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	-	1
16	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	-	2
17	Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	6	2	8
18	Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula	3	1	4
19	Fungsional Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	1	2	3
20	Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	4	1	5
21	Fungsional Penata Layanan Operasional	1	-	1
22	Fungsional Pengadministrasi Perkantoran	1	-	1
23	Fungsional Pengelola Umum Operasional	2	-	2
24	Jabatan Fungsional Umum	46	14	63
25	Penata Layanan Operasional	28	10	38
26	Pengelola Layanan Operasional	2	-	2
27	Operator Layanan Operasional	75	6	81
28	Pengelola Umum Operasional	75	-	76
Jumlah Total		288	45	333

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

No	Nama Barang/ Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jml.	Satu an	Kondisi			Tahun Perole han	Lokasi Penempatan	Keterangan
					B	R	R			
					B	R	B			
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	4	Unit	4			2017	1. Jln Mangunreja - Sukaraja Km.1,2 2. Jln Pagendingan Cisayong	1. DPUTRLH 2. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi 3. UPTD Peralatan dan Perbengkelan
2	Kendaraan Dinas	Sarana	4	Unit	4			2016	DPUTRLH	Pick Up/ Double Kabin
		Sarana	10	Unit	10			1995 S/D 2015	DPUTRLH	Mini Bus
		Sarana	7	Unit		7		2003 S/D 2013	UPTD PU Wilayah	Pick Up
		Sarana	60	Unit	53	7		1991 S/D 2020	DPUTRLH, UPTD Wilayah, UPTD Kebersihan	Sepeda Motor
		Sarana	10	Unit	8	2		2016 s/d 2023	UPTD Kebersihan	Armada Sampah
		Sarana	6	Unit		6		2022	1. UPTD Wil.Sukaratu 2. UPTD Kebersihan Desa Sukasukur 3. Bank Sampah Desa Tenjonagara	Roda Tiga
3	Peralatan Umum Kantor	Sarana	32	Unit	28	4		2003 S/D 2024	DPUTRLH	Sekretariat dan bidang
4	Laptop	Sarana	27	Unit	25		2	2018 s/d 2024	DPUTRLH	Sekretariat dan bidang
5	Printer	Sarana	45	Unit	30	10	5	2011 s/d 2023	DPUTRLH	Sekretariat dan bidang
6	Meja Kerja	Sarana	63	Unit	50	13		2007 s/d 2024	DPUTRLH	DPUTRLH
7	Kursi Rapat	Sarana	163	Unit	100	63		2007 s/d 2024	DPUTRLH	DPUTRLH
8	Mesin Gilas Jalan	Sarana	15	Unit		15		1968 s/d 1997	UPTD ALKAL	DPUTRLH
9	Mesin Gilas Bergetar	Sarana	4	Unit		4		1981 s/d 2002	UPTD ALKAL	DPUTRLH
10	Lot Alat Bengkel	Sarana	1	Unit	1			1990	UPTD ALKAL	DPUTRLH
11	Batery Electric Shop	Sarana	1	Unit		1		1990	UPTD ALKAL	DPUTRLH
12	Mesin Pres Hidrolik	Sarana	1	Unit		1		2017	UPTD ALKAL	DPUTRLH
13	Vibratory Tandem Roller	Sarana	1	Unit	1			2017	UPTD ALKAL	DPUTRLH
14	Wheel Loader	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD ALKAL	DPUTRLH
15	EXCAVATOR	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD ALKAL	DPUTRLH
16	Truck Tronton (Trailer)	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD ALKAL	DPUTRLH
17	Mesin Rumput	Sarana	1	Unit		1		2004	UPTD ALKAL	DPUTRLH
18	Sondir	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
19	Hand Bor	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
20	Hydrometer Analisis test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
21	Speedy Moisture	Sarana	4	Unit		4		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
22	Moisture Content test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
23	Specipic Graviti	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH

No	Nama Barang/ Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jml.	Satu an	Kondisi			Tahun Perole han	Lokasi Penempatan	Keterangan
					B	R	R			
					B	R	B			
24	Compaction test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
25	Liquid Limit Device	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
26	Plastic Limit test	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
27	Field CBR test	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
28	Sand Cond test	Sarana	5	Unit	5			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
29	Consolidation	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
30	Direct Shear	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
31	DCP	Sarana	4	Unit		4		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
32	Laboratori CBR test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
33	Sample Spliter	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
34	Tickness Guage	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
35	Round Sieves	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
36	Sieves Shaker	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
37	Sand Equivalent test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
38	Absorption On Fine Agregate	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
39	Organic Impurities	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
40	Los Angeles Abration Machine	Sarana	2	Unit		2		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
41	Laboratory Penetration	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
42	Centrifuge Extractor	Sarana	1	Unit			1	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
43	Reflux Extractor	Sarana	5	Unit	5			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
44	Marshall Test	Sarana	2	Unit		2		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
45	Core Drilling Machine (Mesin Koring)	Sarana	5	Unit	3		3	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
46	Diamond Bit	Sarana	26	Unit	26			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
47	Concrete Cube Mold (Kubus)	Sarana	35	Unit	35			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
48	Compression Machine	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
49	Hammer test	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
50	Laboratory Concrete Mixer	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
51	Slump test	Sarana	3	Unit		3		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
52	Kubus Semen Mortar	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
53	Balan Capaciti 2610 Gr	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
54	Balan Capaciti 20 Kg	Sarana	4	Unit	4			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
55	Balan Capaciti 16 Kg	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
56	Balan Capaciti 5 Kg	Sarana	1	Unit			1	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
57	Balan Capaciti 310 Gr	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
58	Square Pan	Sarana	8	Unit	8			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
59	Round Pan	Sarana	50	Unit		50		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
60	Sample Can	Sarana	6	Unit		6		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
61	Thin Box	Sarana	90	Unit	90			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
62	Mixing Bowl	Sarana	18	Unit	18			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
63	Graduated Cylinder 1000 ml	Sarana	8	Unit	8			2019	UPTD LAB	DPUTRLH

No	Nama Barang/ Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jml.	Satu an	Kondisi			Tahun Perole han	Lokasi Penempatan	Keterangan
					B	R	R			
						B	B			
64	Graduated Cylinder 500 ml	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
65	Graduated Cylinder 100 ml	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
66	Graduated Cylinder 25 ml	Sarana	3	Unit		3		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
67	Beaker Glass 600 ml	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
68	Volumetrik Flask 500 ml	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
69	CBR Mold	Sarana	9	Unit	9			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
70	Conus	Sarana	3	Unit			3	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
71	Mortar and Pestle	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
72	Dial Termometer	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
73	Round Scoop	Sarana	5	Unit	5			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
74	Agregat Scoop	Sarana	3	Unit		3		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
75	Cylinder Mold	Sarana	11	Unit	11			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
76	Proving Ring	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
77	Wash Botle	Sarana	1	Unit			1	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
78	Sigmat	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
79	Pahat	Sarana	4	Unit		4		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
80	Palu	Sarana	2	Unit		2		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
81	Kunci Pipa	Sarana	4	Unit	4			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
82	Palu Karet	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
83	Digital Balance 600 Gr	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
84	Volumetrik Flask 100 ml	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
85	Evaporating Dish	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
86	Drying Open	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
87	Vacuum Stand	Sarana	1	Unit			1	2019	UPTD LAB	DPUTRLH
88	Vacuum Flask	Sarana	1	Unit		1		2019	UPTD LAB	DPUTRLH
89	Digital Balance 2000 Gr (20 Kg)	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
90	Vacuum Flask 500 ml	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
91	Vacuum Flask 1000 ml	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
92	Glas Jar	Sarana	4	Unit	4			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
93	Heating Metod (Berat Jenis)	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
94	Manometer 60 kg/cm	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
95	Manometer 250 kg/cm	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
96	Spiral Anchor (Angkur Sepiral Sondir)	Sarana	4	Unit	4			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
97	Sounding Rod (Stang Sondir)	Sarana	20	Unit	20			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
98	Pasir Otawa 25 kg	Sarana	4	Unit	4			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
99	Thermometer Poket	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
100	Jangka Sorong	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
101	Rubber Glover	Sarana	10	Unit	10			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
102	Asbes Glover	Sarana	10	Unit	10			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
103	Leather Glover	Sarana	10	Unit	10			2019	UPTD LAB	DPUTRLH

No	Nama Barang/ Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jml.	Satu an	Kondisi			Tahun Perole han	Lokasi Penempatan	Keterangan
					B	R	R			
					B	R	B			
104	Hammer Core Drill	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
105	Karbit Speedy	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
106	NAASRA	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
107	Marshal Test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
108	Digital Hammer Test	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
109	Digital Balance 2000 Gr (2 kg)	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
110	Glas Jar	Sarana	2	Unit	2			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
111	Karbit Speedy	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
112	DCP	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
113	Diamond Bit	Sarana	3	Unit	3			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
114	Corr Drelling Machine	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH
115	NAASRA	Sarana	1	Unit	1			2019	UPTD LAB	DPUTRLH

Sumber : Pengurus Barang Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Isu Aktual

Isu aktual yang dihadapi oleh DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 diantaranya adalah :

- 1) Peningkatan Infrastruktur Jaringan Jalan
- Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan isu aktual yang selalu muncul setiap tahun dan dapat dikatakan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2025, penyelenggaraan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya lebih difokuskan pada rekonstruksi jalan dan pemeliharaan berkala pada ruas-ruas jalan strategis;
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air diselenggarakan untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan produksi pertanian yang difokuskan pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya dibawah 1000 Ha di sentra pertanian di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Peningkatan Peran Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Sunting

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan peran utama untuk mengurangi kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan terkait isu penurunan stunting, DPUTRLH berperan dalam penyediaan akses air minum yang aman dan akses sanitasi yang layak;

- 4) **Penataan Kawasan dan Bangunan Gedung Pemerintahan**
Isu aktual infrastruktur lainnya yaitu terkait penataan fasilitas terbuka bagi publik di kawasan strategis dan peningkatan kualitas dan penataan bangunan gedung pemerintahan dan gedung kantor Kecamatan untuk menunjang fungsi pelayanan;
- 5) **Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan**
Isu aktual yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup diantaranya adalah peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan pengelolaan persampahan mulai dari pengangkutan, distribusi sampai dengan pengelolaan di TPA termasuk penguatan penyediaan sarana dan prasarannya.

Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (issued strategic) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi: Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Strukur Organisasi, Aspek Kepegawaian, Sarana Dan

Prasarana, Isu Aktual, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja;

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

02

PERENCANAAN

KINERJA

Rencana Strategis

Dari aspek perencanaan kinerja, tahun 2025 merupakan periode ke-lima dari perencanaan strategis jangka menengah daerah periode Tahun 2021-2026 yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dimana telah ditetapkan 5(lima) sasaran strategis dan 11(sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).



Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stragegis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja utama.

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja (Perubahan) DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,92 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,593	Program Penyelenggaraan Jalan
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,56%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	64,92%	- Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		Ketaatan terhadap RTRW	15,16%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.	Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Akses Infrastruktur	Persentase penduduk berakses air minum	67,45%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	50,56%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
	Permukiman Yang Layak	Rasio rumah layak huni	0,2547	• Program Pengembangan Perumahan • Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,36%	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,51	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10,78%	• Program Pengelolaan Persampahan
NO	PROGRAM		ANGGARAN (Rp.)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24.054.181.457	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		16.787.747.300	
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		15.729.736.500	
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		4.255.095.000	
5.	Program Penataan Bangunan Gedung		7.557.846.100	
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		1.494.610.500	
7.	Program Penyelenggaraan Jalan		64.192.864.063	
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		876.779.350	
9.	Program Pengembangan Perumahan		233.550.000	
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		406.850.000	
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		1.304.728.400	
12.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		122.746.900	
13.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		25.000.000	
14.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		525.000.000	
15.	Program Pengelolaan Persampahan		2.670.034.600	
Jumlah Total			140.236.770.170	

03

AKUNTABILITAS

KINERJA

Capaian Kinerja 2025

DPUTRLH telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan cara mengumpulkan data kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Berikut adalah Hasil penilaian kinerja organisasi Tahun 2025.

Tabel 3.1.
Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)(1) X (100% - (2))
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,92	78,9	94,02%	94,02%	15%	79,92%
2	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berda sarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,593	0.576	97,05%	97,05%	15%	82,49%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,56%	70,56%	100,00%	100,00%	15%	85,00%
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	64,92%	64,92%	100,00%	100,00%	15%	85,00%
		Ketaatan terhadap RTRW	15,16%	15,18%	100,13%	100,13%	15%	85,11%
3	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	67,45%	67,45%	100,00%	100,00%	15%	85,00%
		Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	50,56%	50,56%	100,00%	100,00%	15%	85,00%
		Rasio rumah layak huni	0,2547	0,2553	100,21%	100,21%	15%	85,18%
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,36%	52,36%	100,00%	100,00%	15%	85,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)(1) X (100% - (2))
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,51	67,41	102,90%	102,90%	15%	87,47%
5	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	10,78%	10,78%	100,00%	100,00%	15%	85,00%
Total Capaian PK (4)								930,16%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)								84,56%
PKO (6)								BAIK

Total Capaian PK setelah dilakukan normalisasi sebesar 930,16 dan rata-rata capaian kinerja PK DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 sebesar **84,56% (Baik)**.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, DPUTRLH menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator sasaran yang didukung oleh program, kegiatan, dan sub-kegiatan, dengan total anggaran sebesar **Rp. 140.236.770.170,00** dan terealisasi sebesar **94,39%** atau sebesar **Rp. 132.368.543.865,00** dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 5,61% atau sebesar **Rp. 7.868.226.305**. Hasil pengukuran kinerja sasaran dan realisasi keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN				KEUANGAN		
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,593	0,576	97,06	64.192.864.063	59.783.297.293	93,13
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,56%	70,56%	100	16.787.747.300	16.690.875.950	99,42
		Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	64,92%	64,92%	100	9.052.456.600	8.885.851.800	98,16
		Ketaatan terhadap RTRW	15,16%	15,18%	100,13	876.779.350	832.228.800	94,92
2	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses	Persentase penduduk berakses air minum	67,45%	67,45%	100	15.729.736.500	14.718.222.200	93,57

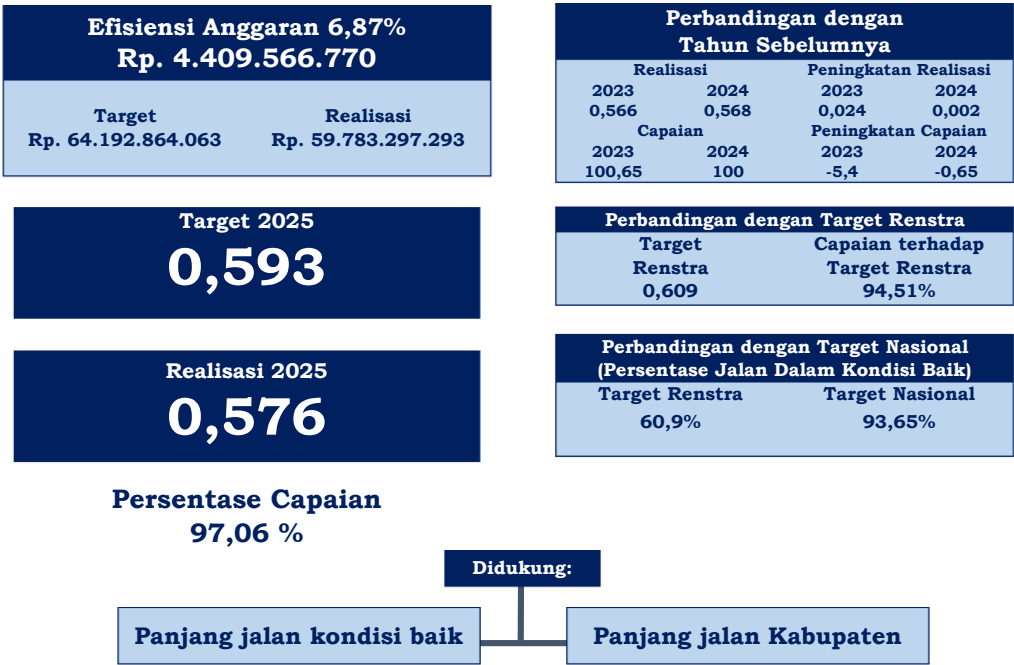
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN				KEUANGAN		
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	infrastruktur permukiman yang layak	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	50,56%	50,56%	100	4.255.095.000	3.942.678.700	92,66
		Rasio rumah layak huni	0,2547	0,2553	100,21	640.400.000	640.255.000	99,98
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	52,36%	52,36%	100	1.304.728.400	1.299.342.400	99,59
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,51	67,41	102,9	672.746.900	657.459.740	97,73
		Persentase jumlah sampah yang tertangani	10,78%	10,78%	100	2.670.034.600	2.649.748.845	99,24
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
4	Meningkatnya pengelolaan sampah							
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	83,92	78,90	94,02	24.054.181.457	22.268.583.137	92,58

Sasaran-1 → IKU-1

SASARAN-1

Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

IKU – 1 :
 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik



Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya.

Berdasarkan penetapan Kepala Daerah tentang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya No PU.12.06/KEP.483-DPUTRLH/2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 178 ruas jalan dengan total panjang jalan 1.230,47 km.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Target panjang jalan dalam kondisi baik tahun 2025 sepanjang 729,67 km dan realisasinya sepanjang 708,18 km, sehingga diperoleh proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,576 dengan perhitungannya sebagai berikut.

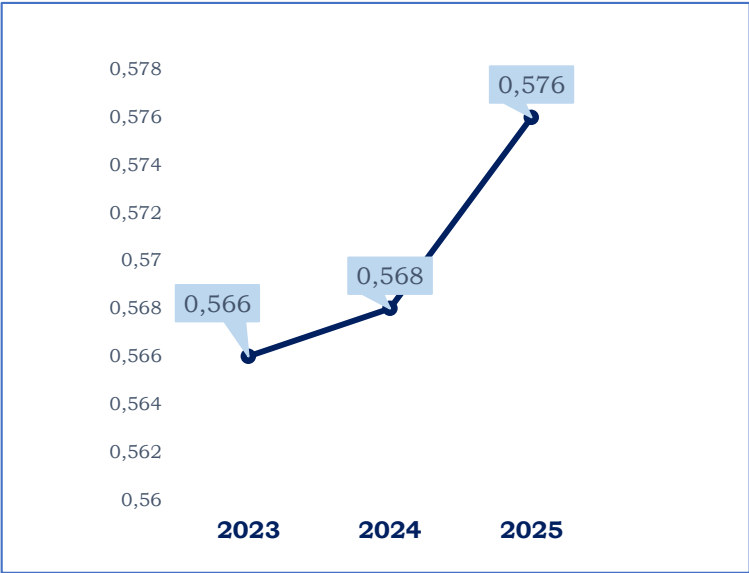
$$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} = \frac{708,18 \text{ Km}}{1230,47 \text{ Km}} = 0,576$$

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,576 poin sedangkan tahun 2024 sebesar 0,568 poin, hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data, tren capaian proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi proporsi panjang jalan tercatat sebesar 0,566 poin, pada tahun 2024 mencapai 0,568 poin, dan pada tahun 2025 mencapai 0,576 poin.

Diagram
Perbandingan
Capaian realisasi
proporsi panjang
jalan dalam
kondisi baik Per-
Tahun **2023,**
2024, 2025



Sumber: Bidang Jalan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 0,609 dan realisasi tahun 2025 sebesar 0,576. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 94,51% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Sasaran penyelenggaraan jalan nasional tahun 2025 dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diantaranya adalah tingkat kemantapan jalan nasional. Pengukuran tingkat kemantapan jalan terdiri dari kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan. Capaian kinerja jalan nasional sebesar 93,65%. Sedangkan tingkat kemantapan jalan Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 69,80%, terdapat gap sebesar 23,85%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,593 dan realisasi sebesar 0,576 dengan persentase capaian sebesar 97,06%.

Kegagalan pencapaian kinerja tersebut dikarenakan:

- Adanya paket pekerjaan penyelenggaraan jalan yang tidak terlaksana yaitu Ruas Jalan Cayur – Neglasari/Tawang;
- Adanya perubahan jadwal pekerjaan yang bersumber dari Inpres Jalan Daerah (IJD) yang direncanakan tahun 2025 menjadi tahun 2026 yaitu Ruas Jalan Papayan – Cikalong.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- Merencanakan kembali paket pekerjaan penyelenggaraan jalan di Ruas Jalan Cayur – Neglasari/Tawang pada Tahun 2026;
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan percepatan penandatanganan kontrak pekerjaan Ruas Jalan Papayan – Cikalong secara *multi years* yang telah dilaksanakan pada bulan desember tahun 2025.

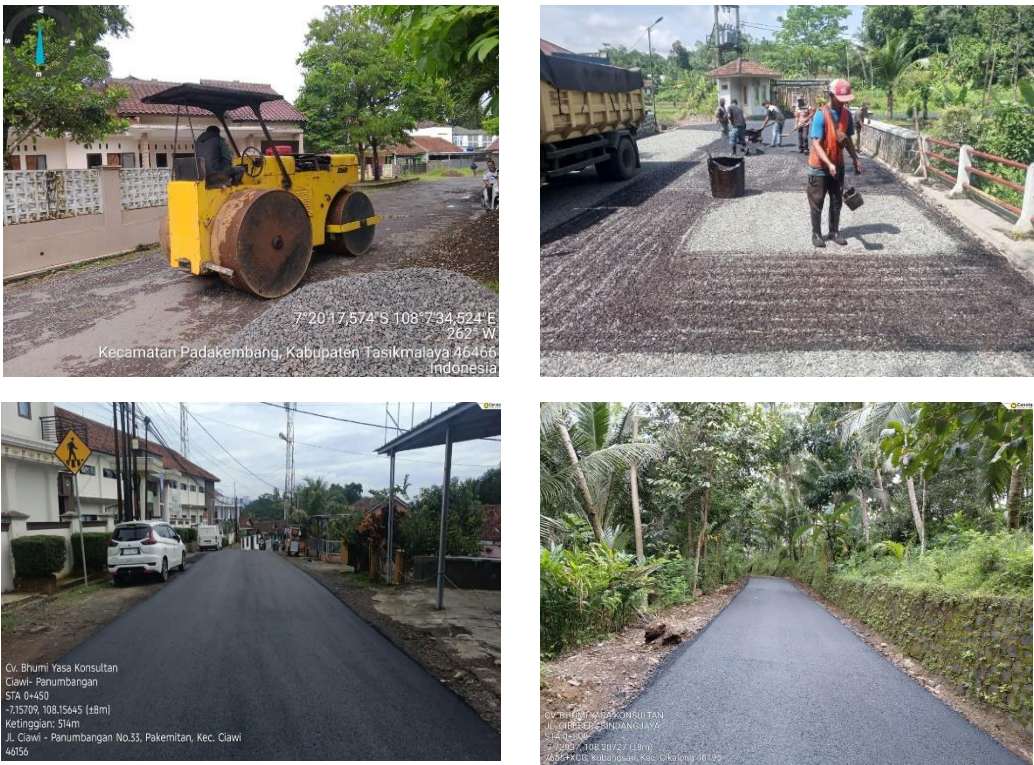
❖ Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 64.192.864.063,00 dan terealisasi sebesar 93,13% atau sebesar Rp. 59.783.297.293,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 6,87% atau sebesar Rp. 4.409.566.770,00

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Penyelenggaraan Jalan dan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2025			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	59,3	57,6	97,06%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	729,67	708,18	97,06%



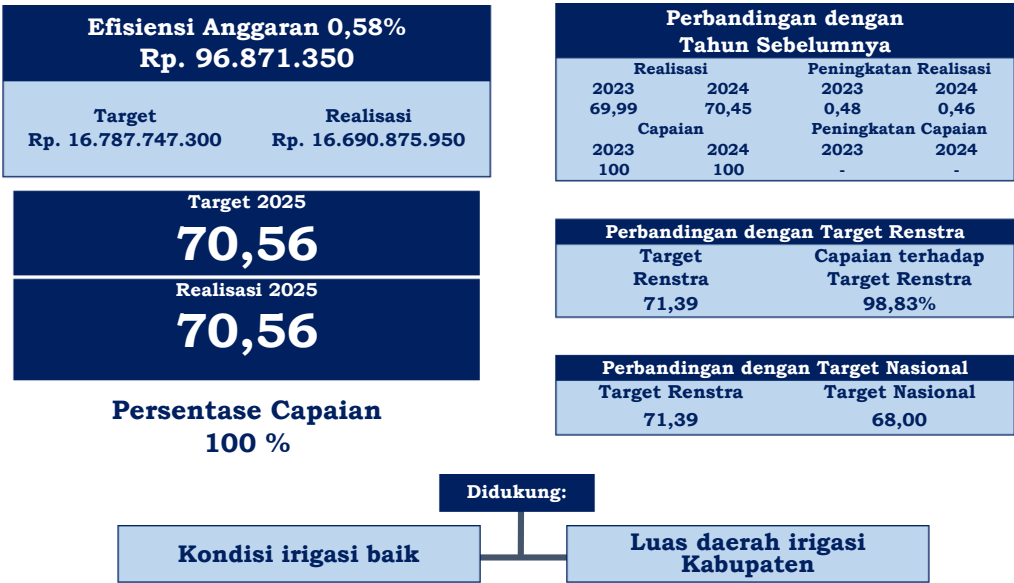
Gambar 3.1.
Dokumentasi Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2025

Sasaran-1 → IKU-2

SASARAN-1

Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

IKU – 2 :
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik



Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dihitung dengan formulasi : luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya dikali 100%.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor. PU.01.01/KEP.332-DPUTRLH/2023 Tentang Lokasi Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 1486 daerah irigasi, dengan total luas sebesar 58.011 HA.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Target tahun 2025 luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 40.935,24 Ha dan realisasinya sebesar 40.930,75 Ha sehingga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 70,56% dengan perhitungannya sebagai berikut.

$$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas daerah irigasi kabupaten tasikmalaya}} \times 100\%$$
$$= \frac{40.930,75 \text{ Ha}}{58.011 \text{ Ha}} \times 100\% = 70,56\%$$

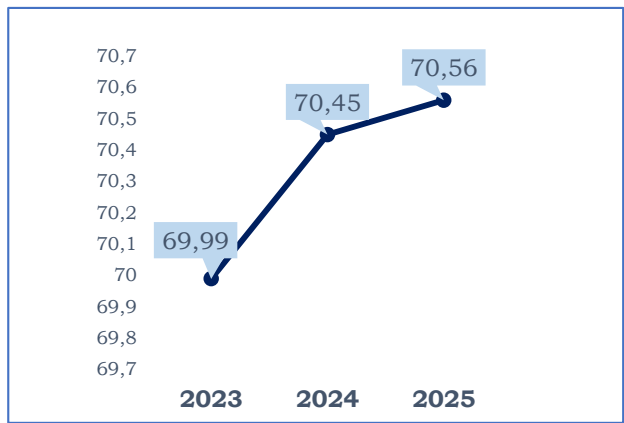
Sumber: Bidang PSDA DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya, 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 0,11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan tren data, capaian persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan progres yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tercatat sebesar 69,99%, pada tahun 2024 mencapai 70,45% dan pada tahun 2025 mencapai 70,56%.

Diagram
Perbandingan
 Capaian realisasi
 persentase irigasi
 kabupaten dalam
 kondisi baik
 Per-Tahun
2023, 2024, 2025



Sumber: Bidang SDA DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 71,39 % dan realisasi tahun 2025 sebesar 70,56%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 98,83% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Berdasarkan data terkini tahun 2025, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi nasional tahun 2025 dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diantaranya adalah persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik fungsional dengan target sebesar 68,00%. Sedangkan tingkat persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten tahun 2025 telah mencapai 70,56%, terdapat gap sebesar 2,56%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik tahun 2025 sebesar 70,56% dan realisasi sebesar 70,56% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu Pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

direncanakan dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu Optimalisasi pengawasan pekerjaan di lapangan.

❖ Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 16.787.747.300,00 dan terealisasi sebesar 99,42% atau sebesar Rp. 16.690.875.950,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 0,58% atau sebesar Rp. 96.871.350,00

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	41141,24	41141,24	100%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	Ha	40941,24	40941,24	100%



Gambar 3.2.
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

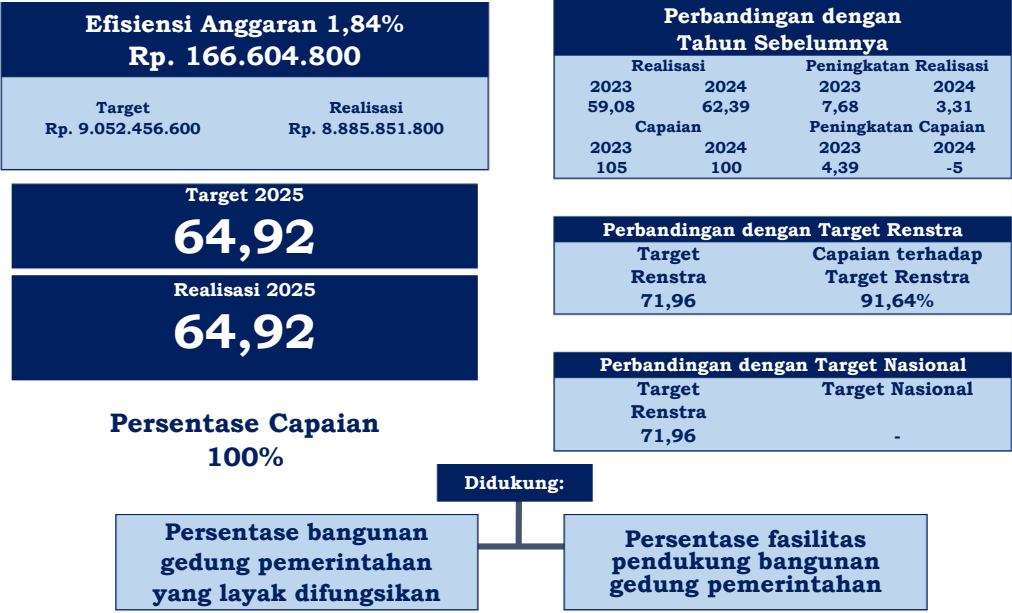
Sasaran-1 → IKU-3

SASARAN-1

Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

IKU – 3 :

Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan



Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan, dihitung dengan formulasi :
Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik ditambah Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan.

❖ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Target tahun 2025 persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik sebesar 48,98% dan persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan sebesar 15,94% dan realisasinya persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik sebesar 48,98% dan persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan sebesar 15,94%

sehingga cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan adalah 64,92% dengan perhitungannya sebagai berikut.

Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik + Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan
= 48,98%+15,94 %
= 64,92%

Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Dengan rincian sebagai berikut:

- ✚ Persentase bangunan gedung pemerintahan yang layak difungsikan sebagai pelayanan publik, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah bangunan pemerintah yang telah dibangun}}{\text{Jumlah kebutuhan bangunan pemerintahan}} \times 80\%$$
$$= \frac{60 \text{ Buah}}{98 \text{ Buah}} \times 80\% = 48,98\%$$

Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

- ✚ Persentase fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan, dihitung dengan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan yang telah dibangun}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas pendukung bangunan gedung pemerintahan}} \times 20\%$$
$$= \frac{220 \text{ Buah}}{276 \text{ Buah}} \times 20\% = 15,94\%$$

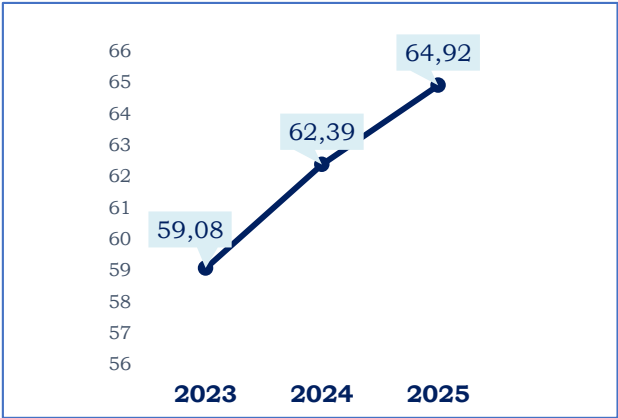
Sumber: Bidang Bangunan DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan mengalami peningkatan sebesar 2,53% dibandingkan dengan tahun 2024.

Berdasarkan tren data, pada tahun 2023 realisasi cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan tercatat sebesar 59,08%, pada tahun 2024 mencapai 62,39%, dan pada tahun 2025 mencapai 64,92%.

Diagram
Perbandingan
Capaian realisasi cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan Per-Tahun **2022, 2023, 2024**



Sumber: Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 71,96 % dan realisasi tahun 2025 sebesar 64,92%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 91,64% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan tahun 2025 sebesar 64,92% dan realisasi sebesar 64,92% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yaitu meningkatnya perhatian stakeholder untuk perbaikan gedung negara terutama kantor kecamatan dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 9.052.456.600,00 dan terealisasi sebesar 98,16% atau sebesar Rp. 8.885.851.800,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 1,84% atau sebesar Rp. 166.604.800,00

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan keterse-diaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendu-kungnya yang layak difungsikan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	65,12	65,12	100%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	56	56	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	73,19	73,19	100%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan langkungannya yang telah dibangun	Unit	202	202	100%



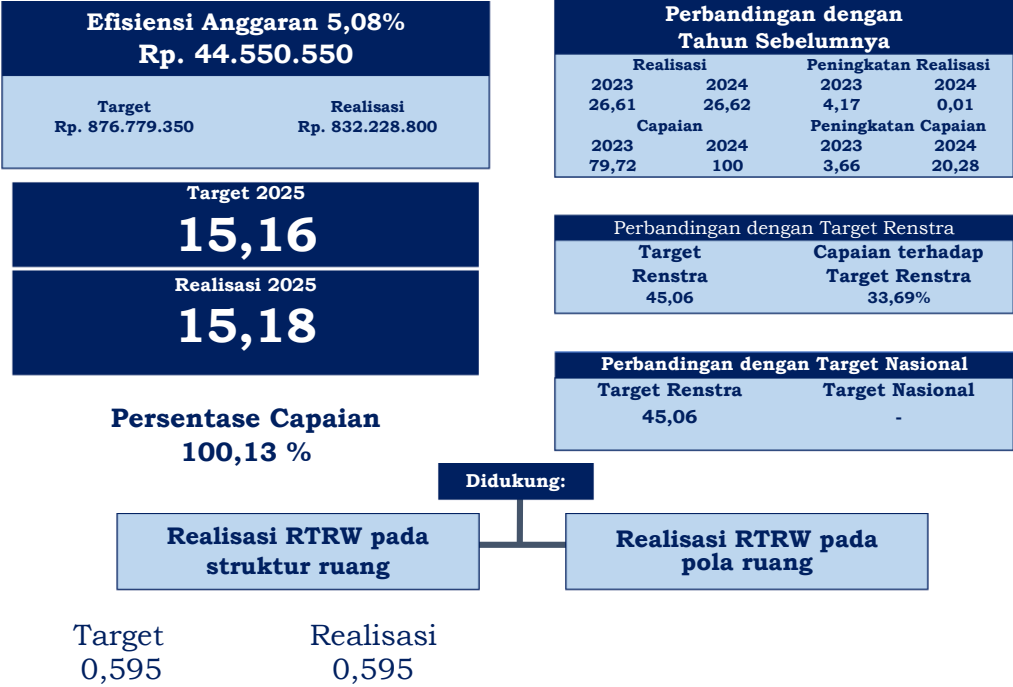
Gambar 3.3.
Kegiatan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Tahun 2025

Sasaran-1 → IKU-4

SASARAN-1

Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

IKU – 4 :
Ketaatan terhadap RTRW



Persentase Ketaatan terhadap RTRW, dihitung dengan formulasi Rerata dari pejumlahan Realisasi RTRW pada struktur ruang dengan realisai RTRW pada pola ruang. Dimana **realisasi RTRW pada struktur ruang**, dihitung dengan formulasi Terlegalisasinya Perbup RDTR dibagi Target Perbup RDTR berdasarkan RTRW.

Sedangkan untuk **realisai RTRW pada pola ruang**, dihitung dengan formulasi Luas lahan yang sesuai ditambah luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan dibagi Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

- ❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**
- Pada tahun 2025 target RTRW pada struktur ruang sebesar 8,33% dan target RTRW pada pola ruang sebesar 21,99% sedangkan Realisasi RTRW pada struktur ruang sebesar 8,33% dan realisai RTRW pada pola ruang sebesar 22,03% sehingga Ketaatan

terhadap RTRW adalah 15,18% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{Realisasi RTRW pada Struktur Ruang} + \text{Realisasi RTRW pada Pola Ruang})}{2} \\ &= \frac{(8,33\% + 22,03\%)}{2} \\ &= 15,18\% \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kab. Tasikmalaya, 2025

Dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Realisasi RTRW pada Struktur Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Terlegalisasinya Perbup RDTR}}{\text{Target Perbup RDTR berdasarkan RTRW}} \times 100\% \\ &= \frac{1 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100\% \\ &= 8,33\% \end{aligned}$$

Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024

Realisasi RTRW pada Pola Ruang, dapat dihitung sbb:

$$\begin{aligned} &\frac{\text{Luas lahan yang sesuai} + \text{Luas lahan yang sesuai dengan proses perizinan}}{\text{Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya}} \times 100\% \\ &= \frac{(57397,6 \text{ Ha} + 2276,84 \text{ Ha})}{270881 \text{ Ha}} \times 100\% \\ &= 22,03\% \end{aligned}$$

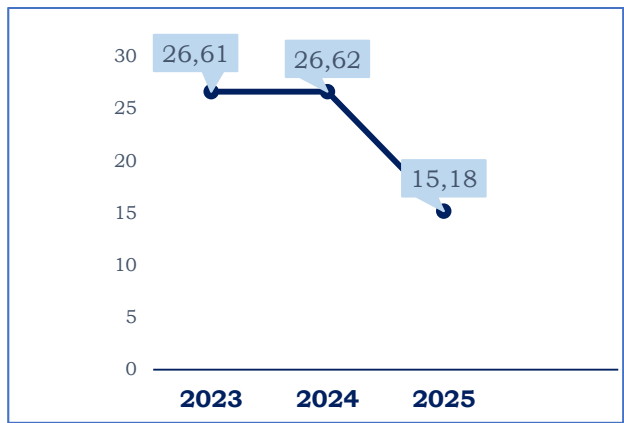
Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Hingga akhir tahun 2025, realisasi ketaatan terhadap RTRW mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 11,44% dibandingkan dengan tahun 2024.

Pada tahun 2023, realisasi ketaatan terhadap RTRW tercatat sebesar 26,61%, relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 26,62%, namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 15,18%.

Diagram
Perbandingan
Capaian realisasi
persentase
Ketaatan
terhadap RTRW
Per-Tahun
2023, 2024, 2025



Sumber: Bidang Penataan Ruang DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Persentase Ketaatan terhadap RTRW yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 45,06 % dan realisasi tahun 2025 sebesar 15,18%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 33,69% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target persentase Ketaatan terhadap RTRW tahun 2025 sebesar 15,16% dan realisasi sebesar 15,18% dengan capaian kinerja sebesar 100,13%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu meningkatnya ketaatan terhadap struktur ruang dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi dan koordinasi.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 876.779.350,00 dan terealisasi sebesar 94,92% atau sebesar Rp. 832.228.800,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 5,08% atau sebesar Rp. 44.550.550,00

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	45,16	45,16	100%
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	36,17	36,17	100%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	5	5	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Keg	1	1	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	Ha	829,3	829,3	100%



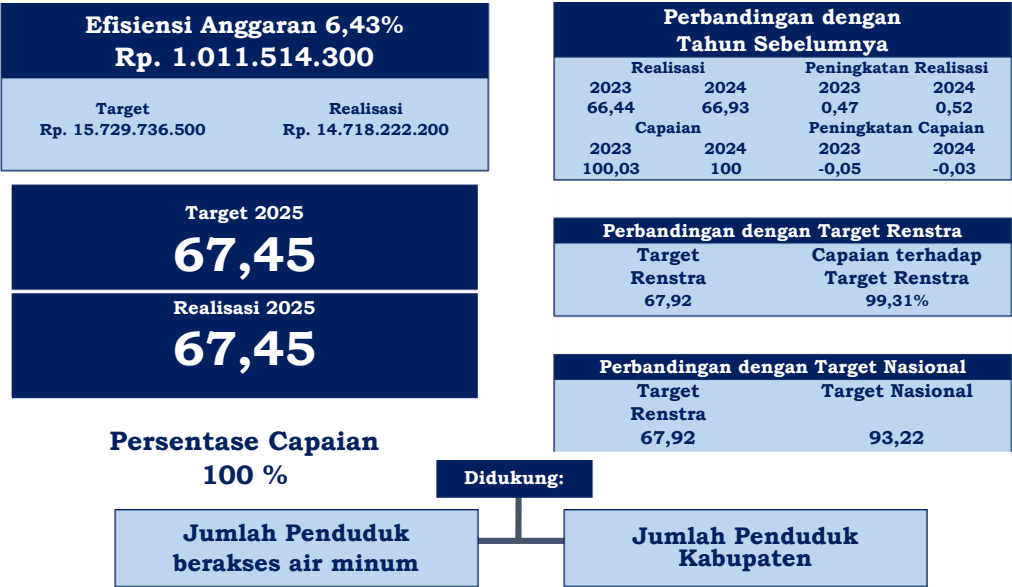
Gambar 3.4.
Kegiatan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran-2 → IKU-5

SASARAN-2

Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak

IKU – 5 :
Persentase penduduk berakses air minum



Persentase penduduk berakses air minum, dihitung dengan formulasi $\frac{\text{Target}}{0,895} \times \frac{\text{Realisasi}}{0,895}$ jumlah penduduk berakses air minum dibagi jumlah penduduk dikali 100%.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Pada tahun 2025 target Penduduk Berakses Air Minum sebanyak 1.216.625 Jiwa dan realisasinya sebanyak 1.216.629 dimana jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.803.800 jiwa, sehingga Persentase penduduk berakses air minum adalah 67,45% dengan perhitungan sebagai berikut.

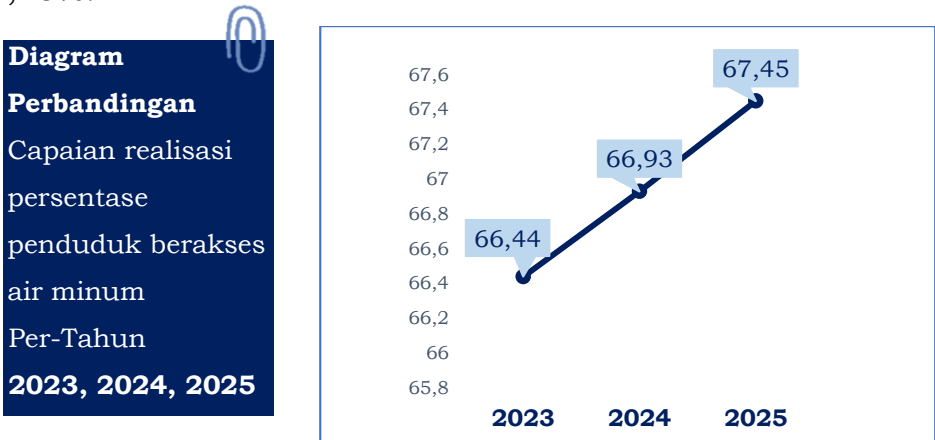
$$\frac{\text{Jumlah penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$
$$= \frac{1.216.629 \text{ jiwa}}{1803800 \text{ Jiwa}} \times 100\% = 67,45\%$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,52% dibandingkan dengan tahun 2024. Sepanjang tahun 2025 jumlah penduduk berakses air minum mengalami penambahan menjadi 9268 jiwa.

Berdasarkan tren data, pada tahun 2023, realisasi persentase penduduk berakses air minum tercatat sebesar 66,44%, pada tahun 2024 mencapai 66,93%, dan pada tahun 2025 mencapai 67,45%.



Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Persentase penduduk berakses air minum yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 67,92 % dan realisasi tahun 2025 sebesar 67,45%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 99,31% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Berdasarkan data dari BPS Indonesia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak pada tahun 2025 yaitu sebesar 93,22%. Sedangkan persentase penduduk berakses air minum Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 67,45%, terdapat gap sebesar 25,77%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target persentase penduduk berakses air minum tahun 2025 sebesar 67,45% dan realisasi juga sebesar 67,45% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan sosialisasi dan koordinasi.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 15.729.736.500,00 dan terealisasi sebesar 93,57% atau sebesar Rp. 14.718.222.200,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 6,43% atau sebesar Rp. 1.011.514.300,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	20,96	20,96	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1.216.158	1.216.158	100,00%





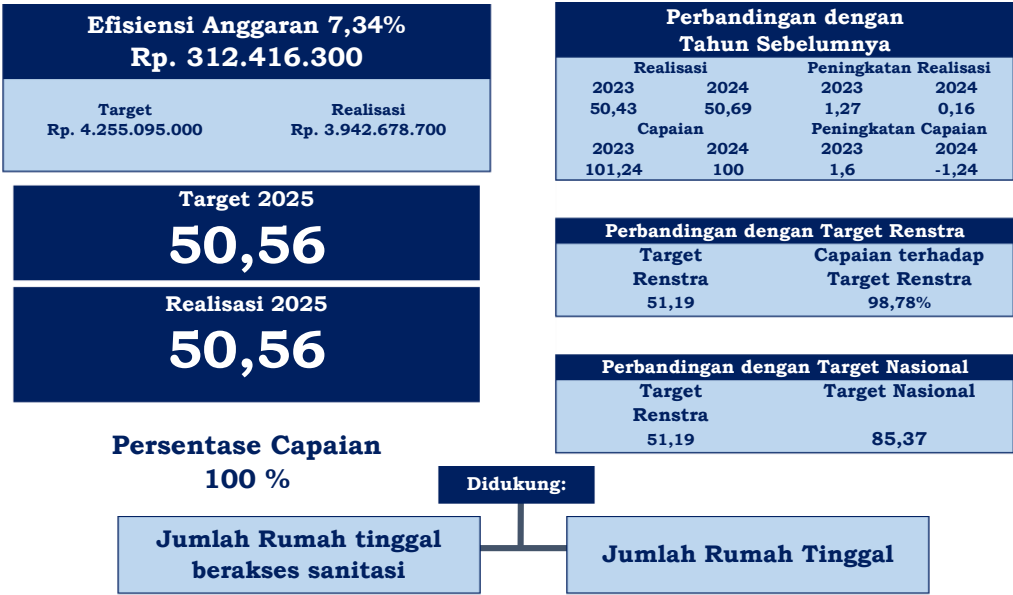
Gambar 3.5.
Kegiatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran-2 → IKU-6

SASARAN-2

Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak

IKU – 6 :
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi



Persentase rumah tinggal berakses sanitasi dihitung dengan formulasi jumlah rumah tinggal dibagi Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%.

❖ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Pada tahun 2025 target jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 255.413 rumah dan juga terealisasi sebanyak 255.413 rumah dimana rumah tinggal di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak

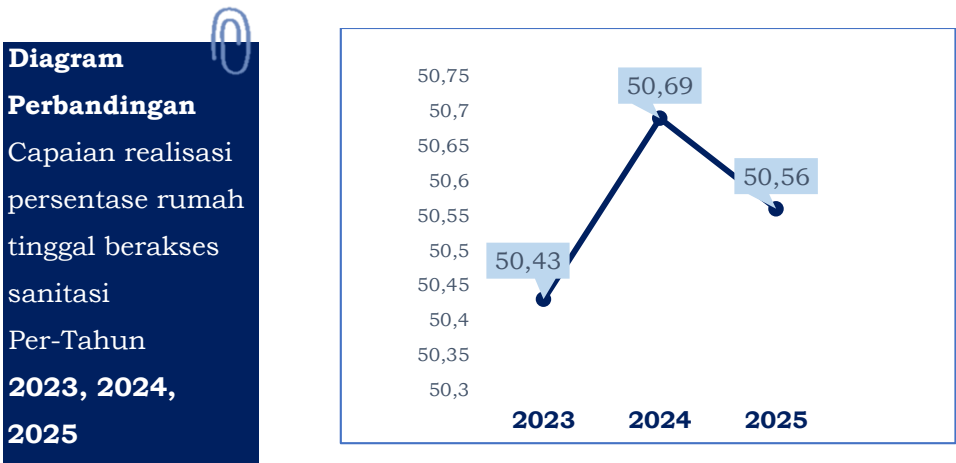
505.122 rumah, sehingga Persentase penduduk berakses air minum adalah 50,56% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$$
$$= \frac{255.413 \text{ Rumah}}{505122 \text{ Rumah}} \times 100\% = 50,56 \%$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Sepanjang tahun 2025, jumlah rumah tinggal yang berakses sanitasi mengalami penurunan sebanyak 618 Sambungan Rumah (SR). Penurunan tersebut terlihat dari perbandingan jumlah rumah tinggal berakses sanitasi pada tahun 2024 sebanyak 256.031 SR, menjadi 255.413 SR pada tahun 2025. Pada tahun 2023, realisasi persentase rumah tinggal berakses sanitasi tercatat sebesar 50,43%, pada tahun 2024 mencapai 50,69%, dan pada tahun 2025 mencapai 50,56%.



Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Persentase rumah tinggal berakses sanitasi yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 51,19% dan realisasi tahun 2025 sebesar 50,56%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 98,78% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Berdasarkan data dari BPS Indonesia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak pada tahun 2025 yaitu sebesar 85,37%. Sedangkan persentase penduduk berakses air minum Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 50,56%, terdapat gap sebesar 34,81%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target persentase penduduk berakses air minum tahun 2025 sebesar 50,56% dan realisasi juga sebesar 50,56% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu menurunnya proporsi bantuan dari Pemerintah Pusat dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 4.255.095.000,00 dan terealisasi sebesar 92,66% atau sebesar Rp. 3.942.678.700,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 7,34% atau sebesar Rp. 312.416.300,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	%	45,97	45,97	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	256.250	256.250	100%



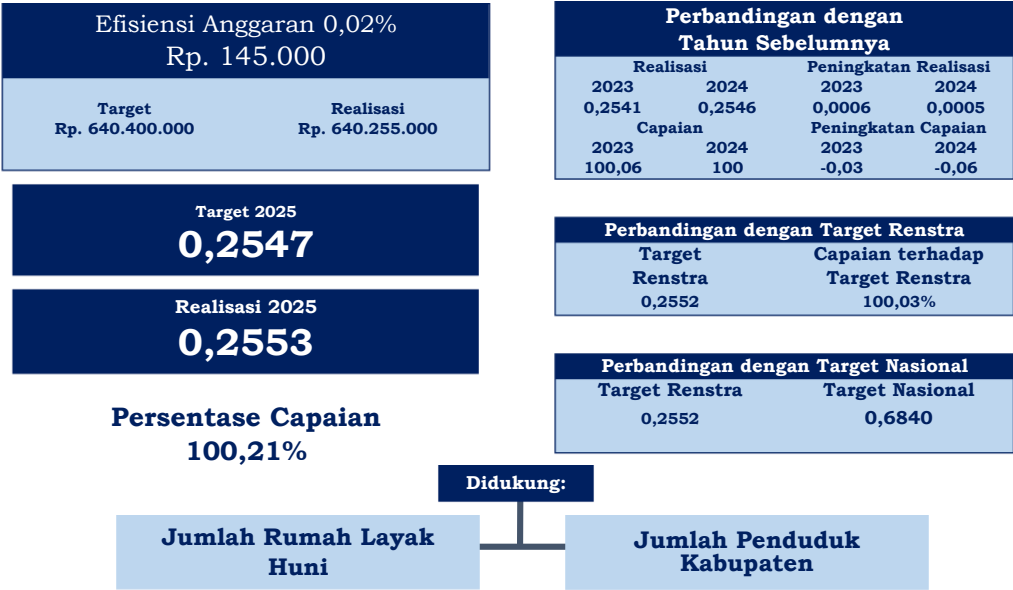
Gambar 3.6.
Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran-2 → IKU-7

SASARAN-2

Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak

IKU – 7 : Rasio Rumah Layak Huni



Rasio Ketersediaan rumah layak huni, dihitung dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Dimana jumlah penduduk kabupaten tasikmalaya sebanyak 1.803.800 jiwa.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

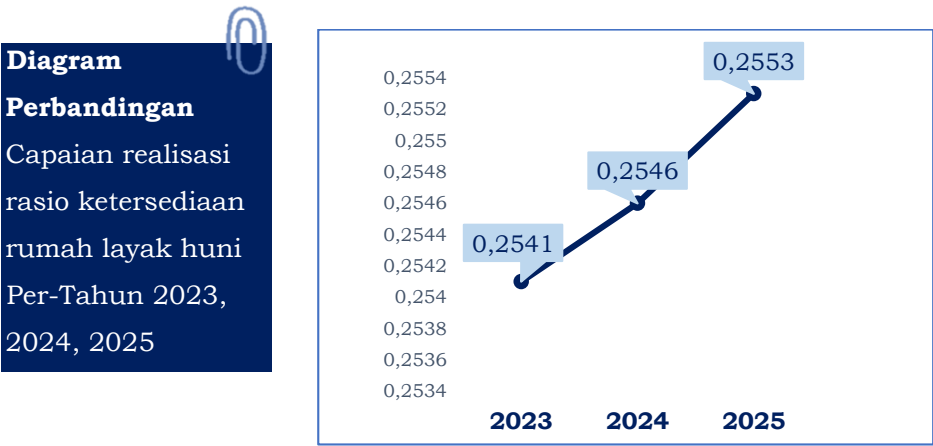
Pada tahun 2025 target Jumlah Rumah Layak Huni sebanyak 459.505 rumah dan terealisasi sebanyak 460.484 rumah dimana penduduk di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.803.800 jiwa, sehingga Persentase penduduk berakses air minum adalah 0,2553 dari target 0,2547 dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} = \frac{460.484 \text{ Unit}}{1.803.800 \text{ Jiwa}} = 0,2553$$

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi rasio Ketersediaan rumah layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,0007 poin. Sedangkan capaian rasio Ketersediaan rumah layak huni tahun 2025 meningkat sebesar 0,18% dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan tren data, pada tahun 2023, realisasi Rasio Ketersediaan rumah layak huni tercatat sebesar 0,2541 poin, pada tahun 2024 mencapai 0,2546 poin, dan pada tahun 2025 mencapai 0,2553 poin.



Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Rasio Ketersediaan Rumah Layak Huni yang termuat dalam

Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 0,2552 dan realisasi tahun 2025 sebesar 0,2553. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 100,03% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Berdasarkan data dari BPS Indonesia Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak pada tahun 2025 yaitu sebesar 0,6840. Sedangkan Rasio Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 0,2553.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target rasio ketersediaan rumah layak huni tahun 2025 sebesar 0,2547 dan realisasi sebesar 0,2553 dengan capaian kinerja sebesar 100,21%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 640.400.000,00 dan terealisasi sebesar 99,98% atau sebesar Rp. 640.255.000,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 0,02% atau sebesar Rp. 145.000,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani	Laporan	1	1	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	10	10	100%
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	81,05	81,05	100%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	Unit	409.503	409.503	100%



Gambar 3.7.
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

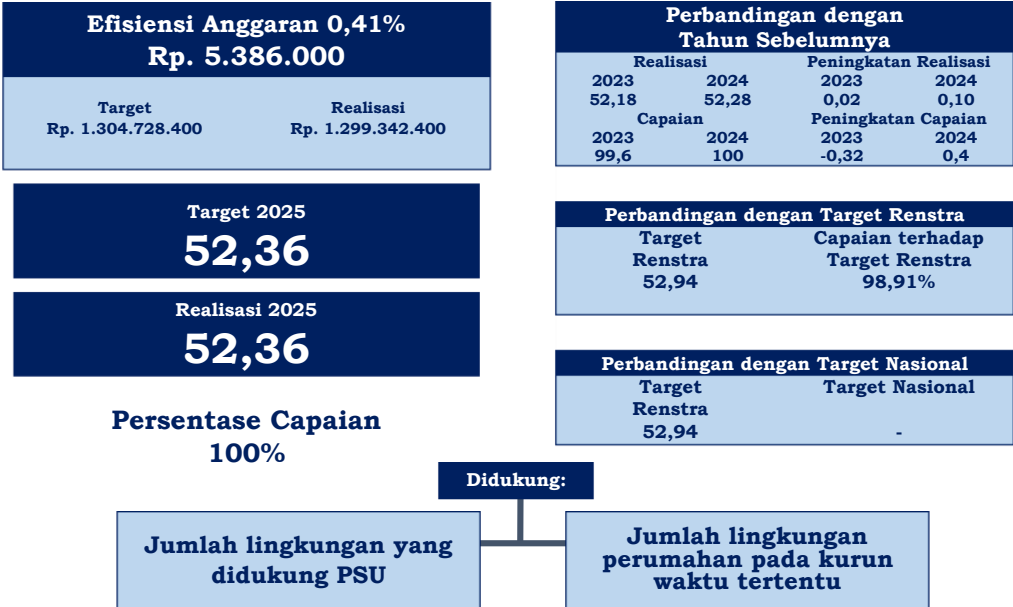
Sasaran-2 → IKU-8

SASARAN-2

Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak

IKU – 8 :

Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu



Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu, dihitung dengan formulasi jumlah lingkungan yang didukung PSU dibagi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

❖ Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Pada tahun 2025 target Jumlah lingkungan yang didukung PSU sebanyak 2436 perumahan dan juga terealisasi sebanyak 2436 perumahan dimana jumlah lingkungan perumahan di Kabupaten Tasikmalaya adalah sebanyak 4652 Perumahan, sehingga Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu adalah 52,36% dengan perhitungan sebagai berikut.

Jumlah lingkungan yang didukung PSU

Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu

2436 Perumahan

4652 Perumahan

x 100%

=

x 100%

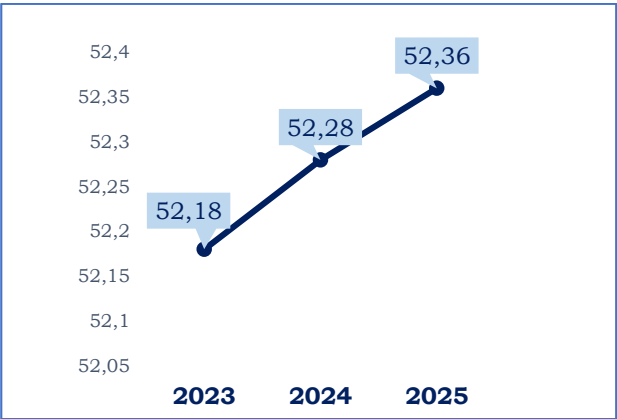
= 52,36%

Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan tren data, pada tahun 2023, realisasi cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tercatat sebesar 52,18%, pada tahun 2024 mencapai 52,28%, dan pada tahun 2025 mencapai 52,36%.

Diagram
Perbandingan
Capaian realisasi
cakupan lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung PSU
Per-Tahun **2023,**
2024, 2025



Sumber: Bidang PKP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 52,94% dan realisasi tahun 2025 sebesar 52,36%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 98,91% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tahun 2025 sebesar 52,36 dan realisasi juga sebesar 52,36 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu meningkatnya perhatian stakeholder dalam percepatan serah terima PSU Perumahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

yaitu meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi PSU Perumahan yang belum diserahkan.

❖ Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 1.304.728.400,00 dan terealisasi sebesar 99,59% atau sebesar Rp. 1.299.342.400,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 0,41% atau sebesar Rp. 5.386.000,00

❖ Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	1,3	1,3	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	245.415	245.415	100%



Gambar 3.8.
Kegiatan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

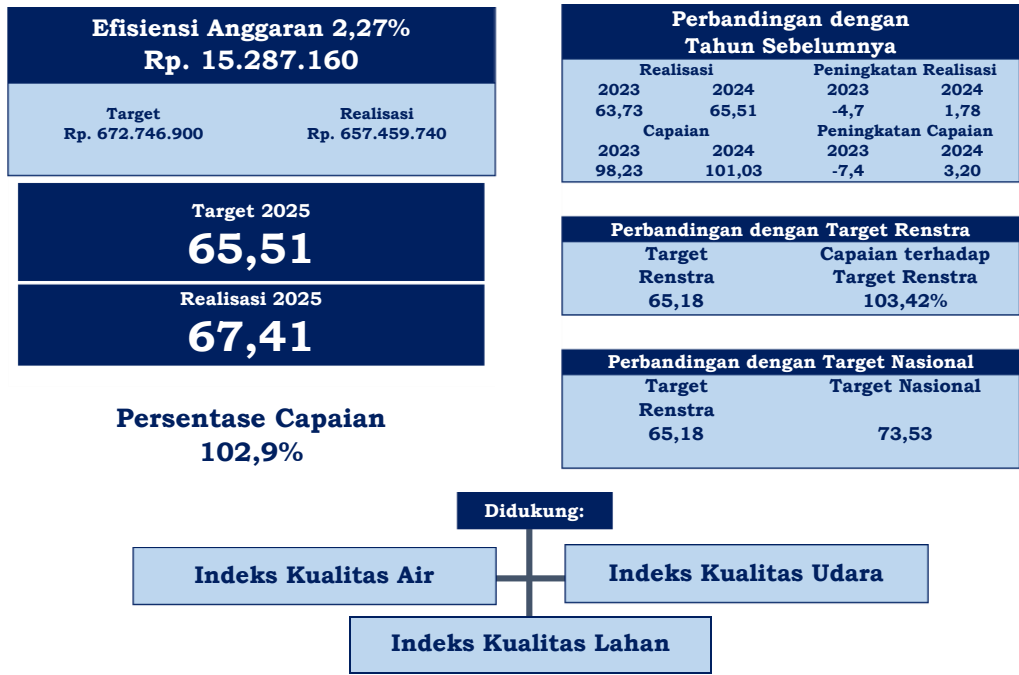
Sasaran-3 → IKU-9

SASARAN-3

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

IKU – 9 :

Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH)



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dihitung dengan formulasi $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan perhitungan yang sudah disediakan oleh provinsi.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Untuk tahun 2025 ini, target nilai indeks kualitas air (IKA) sebesar 52,50 dan juga terealisasi sebesar 52,50, indeks kualitas udara (IKU) sebesar 92,66 terealisasi sebesar 83,31 dan indeks kualitas lahan (IKL) sebesar 37,64 terealisasi sebesar 63,60. Sehingga nilai indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun ini sebesar 67,41.

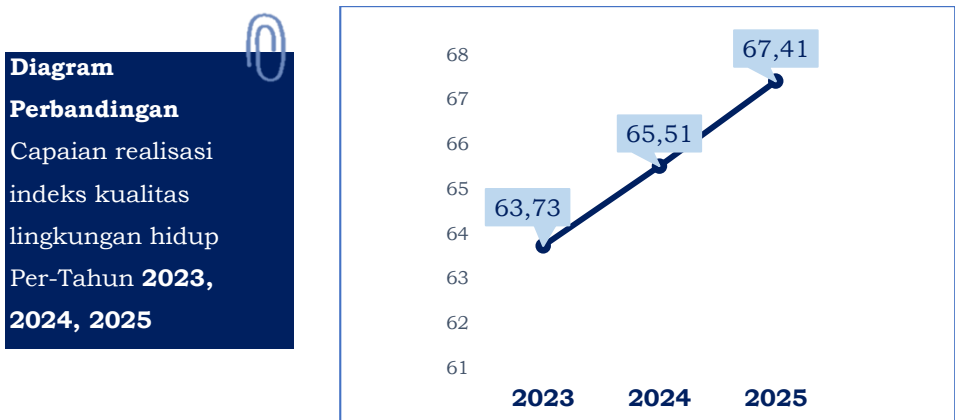
Nilai IKLH

$$= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$
$$= (0,376 (52,50)) + (0,405 (83,31)) + (0,219 (63,60))$$
$$= 67,41$$

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan sebesar 1,90% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,15 poin. Sedangkan, jika dilihat dari sisi capaian, terjadi peningkatan sebesar 1,87% dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan tren data pada tahun 2023, realisasi indeks kualitas lingkungan hidup tercatat sebesar 63,73%, pada tahun 2024 mencapai 65,51%, dan pada tahun 2025 mencapai 67,41%.



Sumber: Bidang LH DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 103,42%. Indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup semakin telah melampaui target Renstra yang telah ditetapkan. Indeks kualitas lingkungan hidup yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 65,18% dan realisasi tahun 2025 sebesar 67,41%.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional tahun 2025 mencapai 73,53. Sedangkan Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 67,41, terdapat gap sebesar 6,12.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 sebesar 65,51 dan realisasi sebesar 67,41 dengan capaian kinerja sebesar 102,9%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu adanya bantuan alat uji pengukuran kualitas air dan udara dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan instansi vertika.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 672.746.900,00 dan terealisasi sebesar 97,73% atau sebesar Rp. 657.459.740,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 2,27% atau sebesar Rp. 15.287.160,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	100	100%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	8	8	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	75	75	100%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Lap	15	15	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	%	90	90	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang dibina	Lembaga Pendidikan	290	290	100%

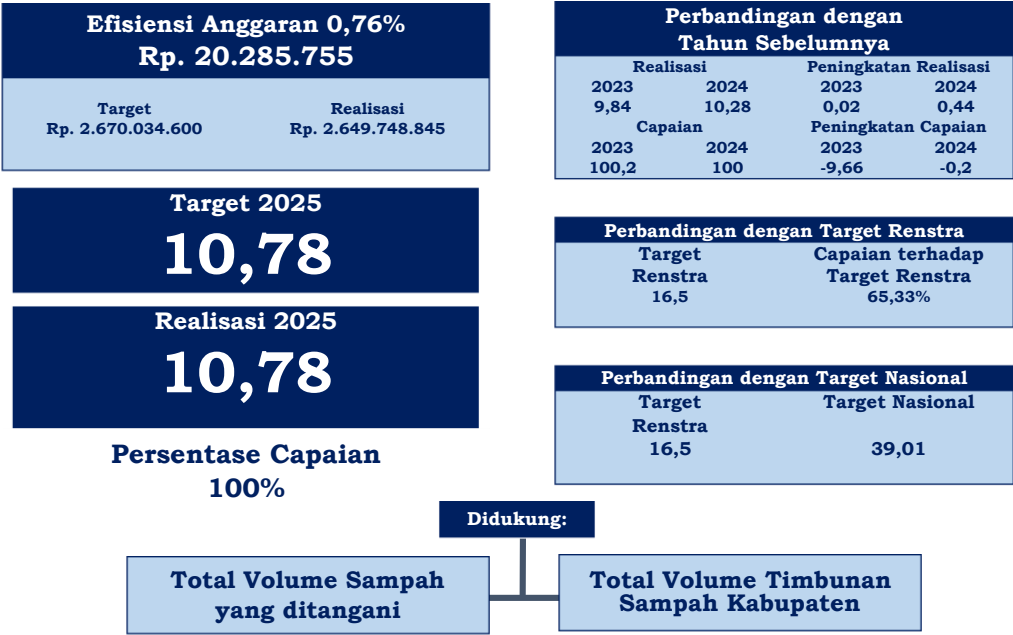


Gambar 3.9.
Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran-4 → IKU-10

SASARAN-4
Meningkatnya pengelolaan sampah

IKU – 10 :
Persentase jumlah sampah yang tertangani



Didukung:

Total Volume Sampah yang ditangani

Total Volume Timbunan Sampah Kabupaten

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Tasikmalaya, dihitung dengan formulasi jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton) dikali 100%.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Pada Tahun 2025 target volume sampah yang ditangani adalah sebesar 37.922 dan jumlah sampah yang tertangani oleh bidang lingkungan hidup sebanyak 37.922 ton dari total jumlah timbunan sampah di kabupaten Tasikmalaya sebanyak 351.785 ton.

Jumlah sampah yang tertangani

Jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota

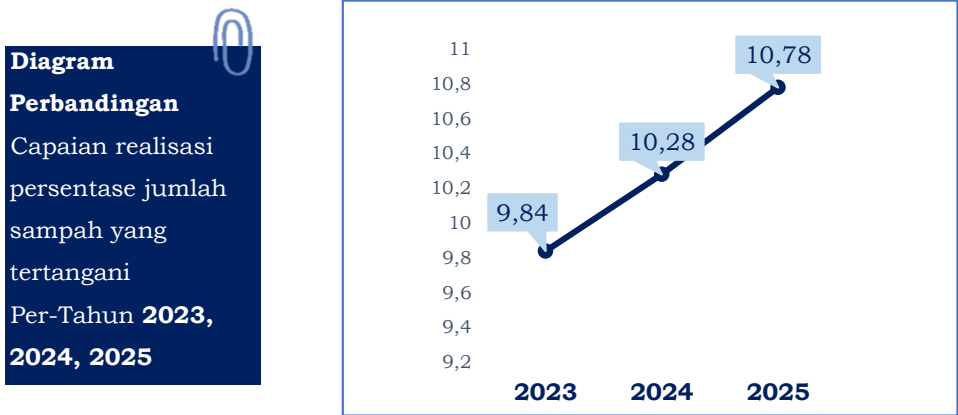
x 100%

= $\frac{37922 \text{ ton}}{351785 \text{ ton}}$ x 100% = 10,78%

Sumber: Bidang Lingkungan Hidup DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya 2024

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi persentase jumlah sampah yang tertangani mengalami peningkatan sebesar 0,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan tren data, pada tahun 2023, realisasi persentase jumlah sampah yang tertangani tercatat sebesar 9,84%, pada tahun 2024 mencapai 10,28%, dan pada tahun 2025 mencapai 10,78%.



Sumber: Bidang LH DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 65,33%. Persentase jumlah sampah yang tertangani yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 16,50% dan realisasi tahun 2025 sebesar 10,78%.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) per Maret 2025, total timbunan sampah di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 56,63 juta ton per tahun, dengan tingkat penanganan dikelola mencapai 39,01% atau sekitar 22,09 juta ton. Sedangkan persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten tahun 2025 baru mencapai 10,78%, atau sebanyak 37.922 ton sampah yang tertangani dari 351.785 ton jumlah timbunan sampah di

kabupaten, terdapat gap sebesar 28,23%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target persentase jumlah sampah yang tertangani tahun 2025 sebesar 10,78% dan realisasi juga sebesar 10,78% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan dan udara dan alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi untuk penambahan armada angkut sampah.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 2.670.034.600,00 dan terealisasi sebesar 99,24% atau sebesar Rp. 2.649.748.845,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 0,76% atau sebesar Rp. 20.285.755,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Pengelolaan Sampah dan Kegiatan Pengelolaan Sampah.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	172030	172030	100%
	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	66,66	66,66	100%



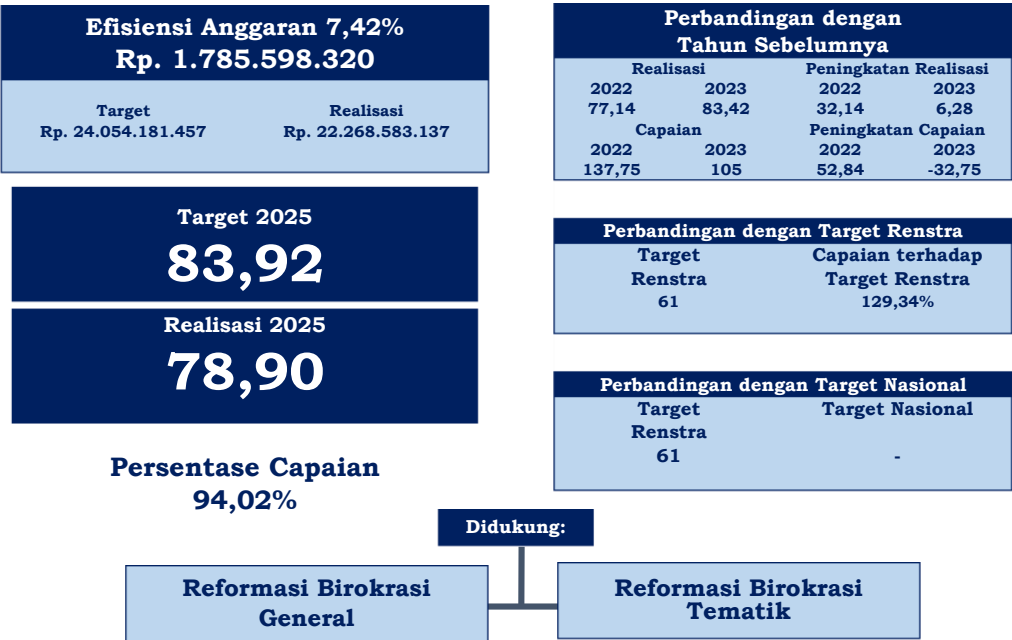
Gambar 3.10.
Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

Sasaran-5 → IKU-11

SASARAN-5

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah

IKU – 11 :
Nilai Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah



Reformasi birokrasi adalah langkah penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan transparan, serta mencapai good governance. Pelaksanaan reformasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan dilakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme evaluasi reformasi birokrasi.

Evaluasi reformasi birokrasi terbagi menjadi dua jenis: evaluasi internal yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan, dan evaluasi eksternal yang mengukur dampak dari pelaksanaan reformasi. Dalam dimensi RB General, fokusnya adalah pada perbaikan tata kelola

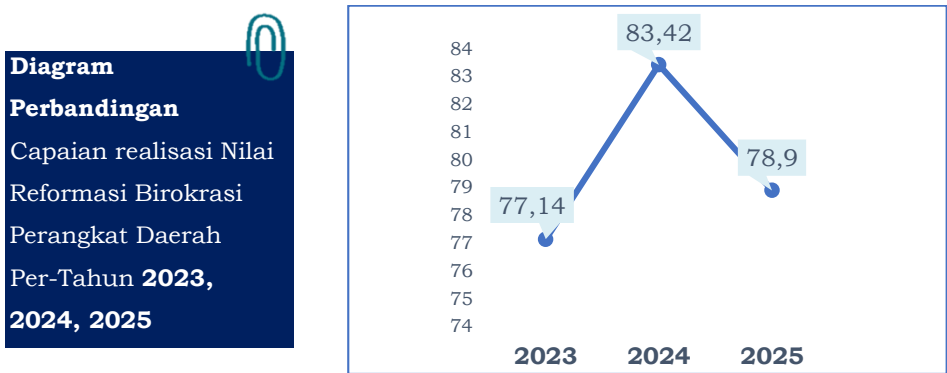
pemerintahan secara umum, sedangkan RB Tematik lebih menekankan pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat terkait dengan tema-tema prioritas pembangunan nasional.

❖ **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**

Pada Tahun 2025 target nilai reformasi birokrasi perangkat daerah adalah sebesar 83,92 poin dan realisais sebesar 78,90 poin.

❖ **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;**

Pada tahun 2025, realisasi nilai reformasi birokrasi perangkat daerah mengalami penurunan sebesar 4,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun berikut diagram yang menunjukkan tren kenaikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas PUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2023 hingga 2025. Terlihat adanya peningkatan signifikan pada nilai RB dari 77,14 pada tahun 2023, menjadi 83,42 pada tahun 2024, dan menurun menjadi 78,90 pada tahun 2025.



Sumber: Sekretariat DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

❖ **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Target nilai reformasi birokrasi perangkat daerah yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 61 dan realisasi tahun 2025 sebesar 78,90%. Maka, realisasi kinerja Tahun 2025 sudah mencapai 129,34% dari target yang ditetapkan dalam Renstra.

❖ **Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;**

Dinas PUTRLH berada di bawah dua naungan kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperoleh nilai 95,73 dengan kategori AA (Istimewa), yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Dinas PUTRLH yang sebesar 78,90 dengan kategori BB (Sangat Baik) terdapat gap sebesar 16,83.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Target nilai reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2025 sebesar 83,92% dan realisasi sebesar 78,90% dengan capaian kinerja sebesar 94,02%. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja yaitu tidak terpenuhinya dokumen pendukung indikator Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Tingkat Kematangan SPBE, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan.

❖ **Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;**

Sumber daya (anggaran) yang mendukung pencapaian kinerja, tercatat sebesar Rp. 24.054.181.457,00 dan terealisasi sebesar 92,58% atau sebesar Rp. 22.268.583.137,00 dengan persentase tingkat efisiensi anggaran adalah 7,42% atau sebesar Rp. 1.785.598.320,00

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,02	73,02	100%
		IKM	Persen	83,26	83,26	100%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	Dok	15	15	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%

Pada sub bab ini juga akan diuraikan 7 (tujuh) analisis yang digunakan untuk menilai capaian kinerja organisasi. Penjelasan mengenai masing-masing analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 sampai dengan Tabel 3.8. berikut ini.

1) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA	REALI SASI	CAPAIAN (%)
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,593	0,576	97,05
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,56	70,56	100
3.	Cakupan keter-sediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	64,92	65,94	101,57
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	15,16	15,18	100,13
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	67,45	67,45	100
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,56	50,56	100
7.	Rasio rumah layak huni		0,2547	0,2553	100,21
8.	Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,36	52,36	100
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,51	67,41	102,9
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,78	10,78	100
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	83,92	78,90	94,02
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025					99,62

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Dan Realisasi Pada Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN		
			2023	2024	2025
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,566	0,568	0,576
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,99	70,45	70,56
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	59,08	62,39	64,92
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	26,61	26,62	15,18
Meningkatnya ketersediaan	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,44	66,93	67,45

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN		
			2023	2024	2025
perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,43	50,69	50,56%
	Rasio rumah layak huni		0,2541	0,2546	0,2553
	Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,18	52,28	52,36
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,73	65,51	67,41
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9,84	10,28	10,78
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	77,14	83,42	78,90

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Pada Tahun Pelaporan Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2025	TARGET PADA PERIODE AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2025
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Poin	0,568	0,576	0,609	94,51%
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,45	70,56	71,39	98,84%
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	Persen	62,39	64,92	71,96	90,22%
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	26,62	15,18	45,06	33,69%
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	66,93	67,45	67,92	99,31%
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,69	50,56%	51,19	98,77%
7.	Rasio rumah layak huni	Poin	0,2546	0,2553	0,2552	100,04%
8.	Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,28	52,36	52,94	98,90%
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	65,51	67,41	65,18	103,42%
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,28	10,78	16,5	65,33%

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN REALISASI KINERJA S/D TAHUN 2025	TARGET PADA PERIODE AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN 2025
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	83,42	78,90	61	129,34%

4) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)**

Tabel 3.6
 Perbandingan Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALI SASI KINERJA	Realisasi Kinerja di Level Nasional	GAP
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	69,8	93,65	23,85
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	70,56	68	2,56
3.	Cakupan keter-sediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendu-kungnya yang layak difungsikan	Persen	65,94	-	-
4.	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	15,18	-	-
5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	67,45	93,22	25,77
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	Persen	50,56	85,37	34,81
7.	Rasio rumah layak huni		0,2553	0,684	-
8.	Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	Persen	52,36	-	-
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,41	73,53	6,12
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,78	39,01	28,23
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	78,9	95,73	16,83
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2025				99,62	

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/ Penurunan Pencapaian Kinerja Pada Tahun Pelaporan Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.7
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Peningkatan/Penurunan Pencapaian Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmlaya Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSENTAS E CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PERBANDINGAN KINERJA 2024 DENGAN 2025		ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA	ALTERNATIF SOSLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
				ME- NINGKAT	ME- NURUN		
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	100 %	97,06%		√	Adanya kegagalan paket pekerjaan jalan dan perubahan jadwal	Meningkatkan koordinasi dan merencanakan kembali paket pekerjaan jalan
2.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100 %	100%			Pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan	Optimalisasi pengawasan pekerjaan di lapangan
3.	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	100 %	100%			Meningkatnya perhatian stakeholder untuk perbaikan gedung negara terutama Kantor Kecamatan	Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan
4.	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100,13%	√		Meningkatnya ketaatan terhadap struktur ruang	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi
5.	Persentase penduduk berakses air minum	100 %	100%			Pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi
6.	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100 %	100%			Menurunnya proporsi bantuan dari Pemerintah Pusat	Meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan
7.	Rasio rumah layak huni	100 %	100,21	√		Pelaksanaan program telah sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan koordinasi dan penambahan usulan bantuan
8.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100 %	100%	√		Meningkatnya perhatian stakeholder dalam percepatan serah terima PSU Perumahan	Meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan verifikasi PSU Perumahan yang belum diserahkan
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	101 %	102,9%	√		Adanya bantuan alat uji pengukuran kualitas air dan udara	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal
10.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100 %	100%			Pelaksanaan program sesuai dengan yang telah direncanakan	Meningkatkan koordinasi untuk penambahan armada angkut sampah
11.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	105 %	99,02		√	tidak terpenuhinya dokumen pendukung indikator Indeks Kualitas Kebijakan Publik, Tingkat Kematangan SPBE, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan	Meningkatkan koordinasi dengan bidang terkait

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.8
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berda sarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawa san lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	97,06	93,13	3,92
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100	99,42	0,58
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	100	98,16	1,84
	Ketaatan terhadap RTRW	100,13	94,92	5,21
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	100	93,57	6,43
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100	92,66	7,34
	Rasio rumah layak huni	100,21	99,98	0,23
	Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100	99,59	0,41
Meningkatnya kualitas lingkun gan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	102,9	97,73	5,17
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	99,24	0,76
Meningkatnya kualitas pelaya nan publik dan tertib adminis trasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	94,02	92,58	6,44

7) Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Perentase Panjang Jalan dalam Kondisi baik	%	55,47	55,47	100,00%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	729,67	729,02	100,00%
Persentase irigasi kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Areal Daerah Irigasi (<1000 Ha) yang Terlayani	Ha	41141,24	41141,24	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Baku Daerah Irigasi yang Terlayani	Ha	40941,24	40941,24	100%
Cakupan keterse-diaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Ketersediaan Bangunan Pemerintahan yang Layak Difungsikan	%	65,12	65,12	100%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pemerintahan yang telah dibangun	Unit	56	56	100%
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Ketersediaan fasilitas Pendukung Bangunan Pemerintahan	%	73,19	73,19	100%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas bangunan dan langkungannya yang telah dibangun	Unit	202	202	100%
Ketaatan terhadap RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Realisasi RTRW pada Struktur Ruang	%	45,16	45,16	100%
		Realisasi RTRW pada Pola Ruang	%	36,17	36,17	100%
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang telah tersusun	Dok	5	5	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Keg	1	1	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Luas lahan yang telah dikeluarkan Informasi Peruntukan Ruang (IPR)-nya	Ha	829,3	829,3	100%
Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Dengan Jaringan Perpipaan	%	20,96	20,96	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses air minum yang aman	Jiwa	1.216.158	1.216.158	100,00%
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Dengan Pengelolaan Skala Setempat	%	45,97	45,97	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tinggal yang telah berakses sanitasi	Rumah	256.250	256.250	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	100	100%
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang terdata/ akan ditangani	Laporan	1	1	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tertangani	Unit	10	10	100%
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	%	81,05	81,05	100%
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	Unit	409.503	409.503	100%
Cakupan lingkun gan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU	%	1,3	1,3	100%
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Rumah yang Telah Terfasilitasi PSU	Unit	245.415	245.415	100%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan pengelolaan LH	%	100	100	100%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Dok	8	8	100%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau air dan udara yang mempunyai kriteria minimal baik	%	75	75	100%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Lap	15	15	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kelembagaan yang berkembang	%	90	90	100%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang dibina	Lembaga Pendidikan	290	290	100%

INDIKATOR KINERJA DALAM PK	PROGRAM/ KEGIATAN TERKAIT	INDIKATOR	KINERJA TAHUN 2024			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jumlah sampah yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kapasitas sampah yang terkelola di sumber	Kubik	172030	172030	100%
	Pengelolaan Sampah	Persentase ketersediaan infrastruktur persampahan yang sesuai kebutuhan daerah	%	66,66	66,66	100%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	73,02	73,02	100%
		IKM	Persen	83,26	83,26	100%
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan	Dok	15	15	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Bulan	12	12	100%

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 menyelenggarakan 15 (Lima Belas) Program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 140.236.770.170,00 (Seratus Empat Puluh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh

Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 132.368.543.865,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau 94,39%.



Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan sampai dengan Bulan Desember 2025 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Akuntabilitas Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSEN-TASE CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEUANGAN			EFISIENSI	
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	Rp.	%
Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berda sarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawa san lingkungan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	97,06	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	64.192.864.063	59.783.297.293	93,13%	4.409.566.770	6,87%
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	100	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.787.747.300	16.690.875.950	99,42%	96.871.350	0,58%
	Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan	100	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	7.557.846.100	7.486.230.500	99,05%	71.615.600	0,95%
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.494.610.500	1.399.621.300	93,64%	94.989.200	6,36%
	Ketaatan terhadap RTRW	100,13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	876.779.350	832.228.800	94,92%	44.550.550	5,08%
Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak	Persentase penduduk berakses air minum	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.729.736.500	14.718.222.200	93,57%	1.011.514.300	6,43%
	Persentase rumah tinggal berakses sanitasi	100	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.255.095.000	3.942.678.700	92,66%	312.416.300	7,34%
	Rasio rumah layak huni	100,21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	233.550.000	233.480.000	99,97%	70.000	0,03%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PERSEN-TASE CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	KEUANGAN			EFISIENSI	
				PAGU	REALISASI	CAPAIAN	Rp.	%
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	406.850.000	406.775.000	99,98%	75.000	0,02%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu	100	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	1.304.728.400	1.299.342.400	99,59%	5.386.000	0,41%
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	102,9	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	122.746.900	108.360.500	88,28%	14.386.400	11,72%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	24.864.000	99,46%	136.000	0,54%
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	525.000.000	524.235.240	99,85%	764.760	0,15%
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.670.034.600	2.649.748.845	99,24%	20.285.755	0,76%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	94,02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.054.181.457	22.268.583.137	92,58%	1.785.598.320	7,42%
JUMLAH				140.236.770.170	132.368.543.865	94,39%	7.868.226.305	5,61%

Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 99,62% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 5 sasaran, terdapat beberapa sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,61% atau senilai Rp. 7.868.226.305 yang rinciannya sebagai berikut:

- Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan ” tercapai melalui kinerja “Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Cakupan ketersediaan bangunan pemerintahan dan fasilitas pendukungnya yang layak difungsikan, dan Ketaatan terhadap RTRW” sebesar 99,69% dan efisiensi anggaran sebesar 5,19%.

2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya ketersediaan perumahan dan akses infrastruktur permukiman yang layak” tercapai melalui kinerja “Persentase penduduk berakses air minum, Persentase rumah tinggal berakses sanitasi, Rasio rumah layak huni, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada kurun waktu tertentu” sebesar 100,05% dan efisiensi anggaran sebesar 2,85%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup” tercapai melalui kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)” sebesar 102,9% dengan efisiensi anggaran sebesar 2,27%.
4. Kinerja Sasaran “Meningkatnya pengelolaan sampah” tercapai melalui kinerja “Persentase jumlah sampah yang tertangani” sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar 0,76%.
5. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi Perangkat Daerah” tercapai melalui kinerja “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sebesar 94,2% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,42%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

Penghargaan



Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025 yang diraih oleh SMPN 1 Jatiwaras dan MTs Cijangkar merupakan salah satu capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung peningkatan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian ini mencerminkan keberhasilan sinergi antarperangkat daerah dalam pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup pada Dinas PUTRLH dalam mendukung penyediaan dan peningkatan sarana prasarana lingkungan sekolah yang ramah lingkungan, berkelanjutan, serta mendorong perilaku hidup bersih dan peduli lingkungan.

Melalui Program Sekolah Adiwiyata, upaya peningkatan kualitas lingkungan dilakukan secara terpadu melalui penataan lingkungan sekolah, pengelolaan sampah, pemanfaatan sarana sanitasi, serta pembiasaan perilaku ramah lingkungan bagi warga sekolah. Implementasi program tersebut memberikan kontribusi tidak langsung namun berkelanjutan terhadap peningkatan nilai IKLH, khususnya pada aspek perilaku masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU IKLH Kabupaten Tasikmalaya. Capaian ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan secara kolaboratif telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

04

PENUTUP

Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Tahun 2025. Pada tahun ini, Laporan Kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi untuk tahun kedua Renstra, melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi di tahun sebelumnya.

Capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya diukur dan diperoleh dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 5 (lima) Sasaran Strategis sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Rata-rata capaian kinerja DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebesar 99,62% dengan kategori BAIK. Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh insan DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan arahan Renstra dan direktif Kepala Daerah.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaran oleh Perangkat Daerah, maka diharapkan penyusunan LKIP DPUTRLH Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini dapat memenuhi fungsinya sebagai :

1. Sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi manajemen kinerja yang konsisten;
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan;

4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pimpinan organisasi dalam menjalankan misi sebagai tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan;
5. Cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan; dan
6. Bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah yang disusun oleh pemerintah daerah.

Tasikmalaya, Januari 2026

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TASIKMALAYA,**



Dra. RUDF SONJAYA SAEHURI, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670918 198903 1 007

